

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018.

Pada bab ini disajikan mengenai uraian pembahasan hasil dari penelitian. Peneliti juga menjelaskan hasil penelitian yang di hubungkan dengan teori yang telah di sampaikan pada bab sebelumnya. Sesuai data yang telah di analisis dan diolah oleh peneliti mengenai analisis kinerja Pendapatan keuangan pemerintah daerah.

1. Analisa Varians Pendapatan

Berdasarkan Anlisa varians anggaran pendapatan pada tahun 2015 memiliki selisih sebesar Rp. 7.311.976.290,67 atau 99,66%, yang artinya kinerja keuangan dalam anggaran tersebut masih kurang baik karena pemerintah daerah tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah di tetapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa ada beberapa Pendapatan Asli Daerah yang tidak terealisasikan atau tidak tercapai yaitu pada tahun 2015 yang tidak mencapai yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, realisasi anggaran mencapai 81.21%, tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan dari Dinas Kesehatan masih ada pengajuan Klaim pelayanan kesehatan di puskesmas belum diverifikasi pada tahun 2015. Yang berikutnya yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu realisasi anggaran

mencapai 57.27%, karena dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi memberikan penjelasan adanya putusan MK retribusi pengendalian telekomunikasi sehingga tidak bisa di pungut.

Analisa tahun 2016 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin menurun dari tahun sebelumnya yaitu selisih anggaran senilai Rp. 65.132.132.953,86 atau dalam persentase sebesar 97.17%. Pada tahun ini kinerja keuangan dapat dinilai kurang baik karena ada beberapa realisasi anggaran yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah menurun karena tidak terealisasinya secara keseluruhan dari Pendapatan Retribusi Daerah yang hanya terealisasi 97.86%, dan juga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya terealisasi 87.73%.

Analisa tahun 2017 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah mengalami kenaikan 1.39% dari tahun sebelumnya yaitu selisih anggaran senilai Rp. 33.602.983.962,65 atau 98.56%. Meskipun dalam persentase anggaran pendapatan naik pada tahun ini kinerja keuangan dapat dinilai masih kurang baik karena ada beberapa realisasi anggaran yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini di pengaruhi oleh adanya judicial review dari MK tentang penyesuaian tarif retribusi menara telekomunikasi, sehingga tidak bisa dilakukan secara rinci. Dan juga adanya regulasi dari pusat yang mencatat beberapa potensi Pendapatan Asli Daerah yang tidak dipungut diantaranya ijin HO, biaya cetak KTP dan KK.

Analisa tahun 2018 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah mengalami kenaikan 1.03% dari tahun sebelumnya yaitu selisih anggaran senilai Rp. 9.626.486.327,42 atau 99.59%. Meskipun dalam persentase anggaran pendapatan naik pada tahun ini kinerja keuangan dapat dinilai masih kurang baik karena ada beberapa realisasi anggaran yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

a. Dinas Kesehatan

Pendapatan Dana Kapitasi JKN dengan target anggaran senilai Rp. 29.635.267.700 dan terealisasi Rp. 27.239.420.468 atau 91.92%. Hal ini diberlakukannya sistem pembayaran BPJS kesehatan berdasarkan jumlah tenaga kesehatan (Dokter) dan sistem penilaian KBKP (Komitmen Berbasis Kompetensi Pelayanan) dikalikan dengan jumlah peserta BPJS disuatu wilayah, dan saat ini jumlah tenaga kesehatan di puskesmas belum memenuhi standart.

b. Dinas Pekerjaan Umum

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan target anggaran senilai Rp. 2.000.000.000 dan terealisasi senilai Rp. 1.064.968.335 atau 53.25%. Hal ini target Pendapatan Asli Daerah bisa tercapai apabila didukung oleh usaha yang berskala besar.

c. Dinas Peternakan

Retribusi tempat pelelangan ikan target anggaran senilai Rp. 15.000.000 terealisasi 0%. Ini terjadi karena TPI sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014

tentang Peraturan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan TPI menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten tetapi untuk bangunan dan sarana TPI di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto tercatat sebagai aset Pemprof Jatim.

d. Dinas Industri dan Perdagangan

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah (BUMD) dengan target anggaran Rp. 345.00.000 dan realisasi anggaran senilai Rp. 12.500.000 atau 3.62%. PT. BPR HAS tidak ada setoran karena memenuhi batas minimal modal BPR senilai Rp. 8.000.000.000 (sesuai dengan peraturan ojk No.5 tahun 2017). Sehingga PT. BPR HAS harus memenuhi modal inti sesuai dengan zonasinya untuk memberikan setoran.

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Jasa Giro Kas Daerah dengan target anggaran senilai Rp. 4.120.652.843 terealisasi senilai Rp. 2.103.073.728,89 atau 51.04%, dan Jasa Goro Pemegang Kas dengan target anggaran senilai Rp. 719.611.263 terealisasi senilai Rp. 116.063.223,66 atau 16.13%. dan Pendapatan dari pengembalian Kegiatan dengan target anggaran senilai Rp. 2.060.123.257,17 terealisasi senilai Rp. 310.224.700,27 atau 15.06%. artinya bahwa kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga pendapatan dari pengembalian kegiatan tidak sesuai target. Berdasarkan Analisa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah diteliti maka dilihat dari Varians Anggaran Pendapatan Kabupaten Blitar secara keseluruhan memiliki rata-rata 98.75% atau sebesar Rp 28,918,394,883.65. Dapat dikatakan kurang baik karena Pemerintah Daerah

tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja keuangan dapat diukur dan dinilai dengan cara melihat dan menganalisis suatu laporan keuangan. Maka kita dapat mengetahui seberapa besar kinerja keuangan tersebut.

Sejalan dengan penelitian Erwati dan Fajri dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bungo kurang baik.⁸⁷ Dalam hal ini Mahmudi menjelaskan bahwa Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan kurang baik karena pemerintah daerah tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah dikatan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang di anggarkan.⁸⁸

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Gambar 5.1 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018



Sumber: Data yang diolah peneliti.

⁸⁷ Misni Erwati dan Muhammad Rizki Fajri. "Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo." E-journal

⁸⁸ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.136

Berdasarkan grafik 5.1 dapat dilihat pada tahun 2015 persentase pertumbuhan pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar 10.1%. sehingga dalam hal ini pemerintah daerah pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif di karenakan meningkatnya Retribusi daerah yang mengalami kenaikan yang awalnya hanya terealisasi 88.2% di tahun 2015 ini menjadi 104.46% seperti halnya meningkatnya Retribusi pelayanan kesehatan, menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang menggunakan fasilitas dari puskesmas dan dapat diartikan kesehatan masyarakat kurang begitu baik. Dan juga meningkatnya penerimaan pajak bumi bangunan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sangat tinggi atas tanggung jawab dalam membayar pajak daerah.

Pada tahun 2016 persentase pertumbuhan menurun yaitu sebesar 4.5% menjadi 5.6% untuk Total Pendapatan Daerah. Meskipun persentase pertumbuhan pendapatan di tahun 2016 menurun tetapi jumlah Total Pendapatan Daerah meningkat. Untuk Pendapatan Asli Daerah itu sendiri mengalami peningkatan sebesar 3.5%. PAD meningkat karena didorong dengan meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah sebesar 9.3% dikarenakan meningkatnya pajak restoran, yang artinya konsumen semakin banyak sehingga pajak yang terbayarkan semakin bertambah. Sedangkan untuk pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 1.74% yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan retribusi pasar dan retribusi tempat pelelangan.

pada tahun 2017 persentase pertumbuhan pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar 3.02%. sehingga dalam hal ini pemerintah daerah pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif di karenakan meningkatnya Retribusi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 10.81%, diantaranya yaitu meningkatnya pendapatan dari retribusi terminal, retribusi pelayanan pasar, dan juga retribusi pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk Pendapatan Pajak Daerah meningkat sebesar 21.04% hal ini di pengaruhi oleh meningkatnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 1.90%. meskipun peningkatan pertumbuhan tahun 2018 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, dari Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 12.65% yang artinya PAD tersebut meningkat disebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang mengalami kenaikan sebesar 48.15%, diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya wajib pajak terpenuhi. Untuk Retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 2.52%, hal ini didorong meningkatnya Retribusi jasa umum dan Retribusi jasa usaha.

Dilihat dari dari tahun 2015-2018 pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan persentasenya mengalami penurunan, akan tetapi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dikatakan positif karena pada tahun

anggaran 2015-2018 Total Pendapatan Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam hal ini dijelaskan teori dari Mahmudi menyebutkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan positif dan kecenderungan meningkat, sebaliknya jika terjadi pertumbuhan pendapatan negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.⁸⁹

3. Analisis Rasio Keuangan

a. Derajat Desentralisasi

Pada tahun 2015 derajat desentralisasi pada Kabupaten Blitar sebesar 10.21% yang artinya kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi kurang dan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan kurang. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0.21% menjadi 10% disebabkan oleh peningkatan TPD lebih besar daripada Peningkatan PAD yaitu untuk TPD sebesar 5,6% sedangkan untuk PAD sebesar 3,4% saja. Maka dari itu kemampuan keuangan daerah menjadi sangat kurang.

Peningkatan sebesar 3.99% menjadi 13.99% pada tahun 2017. Disebabkan oleh meningkatnya PAD sebesar 44.7%. Meskipun mengalami peningkatan dalam penyelenggaraan desentralisasi kemampuan keuangan daerah masih kurang. Tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 3.26% menjadi 10.73%, disebabkan oleh penurunan PAD sebesar 32.05% sehingga berpengaruh juga terhadap TPD yang awalnya sebesar 3.02% di tahun 2018 menjadi 1.90%. Maka dari itu kemampuan keuangan daerah menjadi kurang baik. Secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah

⁸⁹ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.137

Kabupaten Blitar memiliki rata-rata sebesar 11.23%, yang artinya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih dinilai kurang baik.

Dalam hal ini dijelaskan teori dari Mahmudi sebagai berikut Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.⁹⁰

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Pada tahun 2015 ketergantungan keuangan daerah sebesar 89.31%, menurun menjadi 89.16% di tahun 2016, di tahun berikutnya menurun lagi sebesar 3.15% menjadi 86.01% pada tahun 2017. Kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2018 menjadi 85.65%.

Disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/ provinsi. Meskipun ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi tetapi setiap tahunnya persentase ketergantungan semakin menurun, berarti dapat di simpulkan bahwa dari tahun 2015-2018 semakin berkurang. Dalam rasio ketergantungan keuangan daerah selama empat tahun terakhir yaitu mencapai rata-rata 87.53%. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah mempunyai

⁹⁰ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*,hal.140

ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi dan pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Blitar masih rendah. Dalam hal ini perjas oleh teori dari Mahmudi menyebutkan bahwa Semakin tinggi rasio maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.⁹¹

c. Rasio Kemandirian

Tingkat rasio kemandirian pada tahun 2015 sebesar 11.43% berarti tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Blitar tahun 2015 rendah sekali. ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 11.22% sehingga kemandirian lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 naik menjadi 16.27% yang artinya pemerintah daerah sedikit mengalami peningkatan menuju kemandirian yang lebih tinggi lagi. sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 3.74% menjadi 12.53%. Dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama empat tahun terakhir tingkat kemandiriannya masih rendah sekali yaitu dengan rata-rata rasio sebesar 12.86%.

Berbanding terbalik dengan Penelitian Erwati dan Fajri pada Kabupaten Bungo yang menunjukkan rasio kemandirian menggambarkan kecenderungan kearah perkembangan naik, sehingga ini merupakan implementasi yang cukup baik.⁹² Teori Mahmudi sebagai memperjelas hasil analisa menyebutkan bahwa Semakin tinggi angka rasio menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi

⁹¹ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*,hal.140

⁹² Misni Erwati dan Muhammad Rizki Fajri. "Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo."E-journal

kemandirian keuangan daerahnya.⁹³ Hal ini menunjukkan rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Blitar dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Pemerintah daerah harus mencari alternatif lain yang dapat mengatasi kekurangan dalam pembiayaan. Seperti halnya melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan unit keuangan berbasis syariah.

d. Rasio Efektivitas

Mengenai efektivitas pendapatan asli daerah dapat dilihat efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2015 kinerjanya sangat efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya sebesar 111.25%. dapat diartikan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas sangat efektif. Karena realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dari pada yang telah dianggarkannya. Kemudian pada Tahun 2016 efektivitas sebesar 104.63%, berarti tahun 2016 kinerjanya sangat efektif. Untuk rasio efektivitas tahun 2017 sebesar 102.72% dan pada tahun 2018 sebesar 107.90%. Pada tahun 2015-2018 dapat disimpulkan bahwa Rasio efektivitas PAD memiliki rata-rata 106.63%, yang artinya kemampuan daerah dalam menjalankan tugas bisa dikatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memonilisasi penerimaan PAD sesuai yang telah dianggarkan.

⁹³ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.140

Berbanding dengan dengan Penelitian Erwati dan Fajri, pada Kabupaten Bungo yang menunjukkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kecenderungan ke arah perkembangan penurunan yang menandakan kinerja yang kurang baik.⁹⁴ Dengan adanya target realisasi pendapatan daerah bertujuan sebagai pendorong kinerja pemerintah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi agar Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Hal ini diperjelas teori Mahmudi menyebutkan bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan.⁹⁵

B. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018.

Dalam pembahasan kali ini peneliti menyajikan hasil analisa mengenai kinerja keuangan belanja daerah kabupaten blitar tahun 2015-2018. Analisis belanja daerah ini penting dilakukan karena untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan anggaran APBD secara ekonomis, efisien dan efektif.

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak

⁹⁴ Misni Erwati dan Muhammad Rizki Fajri. "Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo."E-journal

⁹⁵ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*,hal.141

melebihi dari yang dianggarkan.⁹⁶ Berdasarkan Analisa varians anggaran pendapatan pada tahun 2015 varians belanja sebesar 86.65% Berarti kinerja belanja pada Kabupaten Blitar dinilai baik karena realisasi belanjanya tidak melebihi yang dianggarkannya. Hal ini dikarenakan menurunnya realisasi anggaran Belanja Operasi yang disebabkan oleh tidak adanya realisasi Belanja Bunga, serta menurunnya Belanja Bantuan Sosial.

Pada tahun 2016 kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan varian belanja menjadi 91.35%, meskipun mengalami penurunan kinerja tapi Realisasi anggaran tidak sampai melebihi dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan meningkatnya Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan pada tahun 2017 varians belanja mencapai meningkat lagi menjadi 94.10% yang artinya kinerja belanja semakin menurun lagi, meskipun menurun kinerja belanja masih bisa dikatakan baik karena Realisasi anggaran tidak sampai melebihi dari yang dianggarkan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya belanja aset dan belanja aset lainnya.

Tetapi pada tahun berikutnya di tahun 2018 mengalami kenaikan kinerja belanja sebesar 5.53% yaitu dengan varians belanja sebesar 88.57%. Kinerja belanja naik dikarenakan adanya penghematan Belanja Modal, yaitu penghematan pada Belanja jalan, irigasi dan jaringan, Belanja Aset lainnya dan Belanja Aset Tetap lainnya. Sehingga pada tahun 2018 ini kinerja belanjannya dikatakan baik karena telah mampu mengendalikan dan melakukan penghematan belanja, sehingga tidak melebihi Anggaran yang telah ditetapkan.

⁹⁶ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.155

Bukan berarti untuk penghematan tidak dibelanjakan sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten blitar dikatakan baik karena rata-rata realisasi belanja sebesar 90.17% dapat dipastikan realisasi belanjanya tidak melebihi yang dianggarkan. Tetapi dalam hal ini, bisa jadi Pemerintah Daerah membuat anggaran yang besar supaya realisasi belanja tidak mencapai 100%, sehingga dapat dilihat tidak melakukan pemborosan anggaran belanja.

Sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Tantri dan Irmawati menyatakan bahwa analisis varians belanja di Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik.⁹⁷ tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kainde yang menyatakan bahwa pada Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Pemerintah Kota Bitung kinerjanya kurang baik.⁹⁸

2. Analisis Keserasian Belanja.

Analisis Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik.⁹⁹ Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan tentang porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk

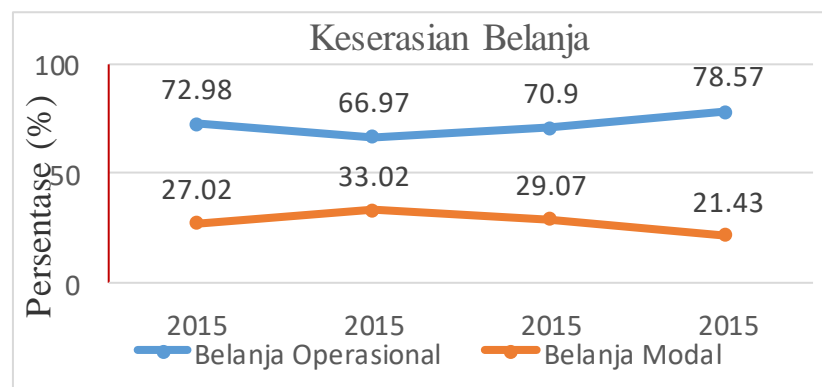
⁹⁷ Sakina Nusarifa Tantri Dan Putri Irmawati. "Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016". Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol.1. No.1. Hal. 27-37. Maret 2018.

⁹⁸ Sakina Nusarifa Tantri Dan Putri Irmawati. "Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016". Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol.1. No.1. Hal. 27-37. Maret 2018.

⁹⁹ Mahmudi. Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...*, hal.160

belanja operasi. Sedangkan Analisis Keserasian Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja daerah. Bertujuan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.¹⁰⁰

Gambar 5.2
Grafik Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Blitar
tahun 2015-2018.



Sumber: Data yang diolah peneliti.

Berdasarkan grafik 5.2 dapat dilihat Berdasarkan grafik diatas rata-rata secara keseluruhan dari tahun 2015-2018 Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan Belanja Operasional sebesar 72.36%. pada tahun 2015 rasio belanja operasi mencapai nilai 72.98% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 6.01% menjadi 66.97%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3.93% menjadi 70.90%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 7.67% menjadi 78.577%, sedangkan untuk pengalokasian Belanja Modal rata-rata sebesar 27.64% dari total Belanja Daerah. pada tahun 2015 rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar

¹⁰⁰ Mahmudi. Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...*hal.162

27.02%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6% menjadi 33.02%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 3.95% menjadi 29.07% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 7.64% menjadi 21.43%. Secara garis besar dapat dilihat bahwa Belanja Operasional cenderung meningkat dibandingkan dengan Belanja Modal yang setiap tahunnya semakin menurun.

Berbanding balik dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Tantri dan Irmawati yang menyebutkan bahwa Belanja Modal yang cenderung meningkat dibandingkan dengan belanja operasi.¹⁰¹ Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi bahwa pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Belanja modal juga tidak bersifat rutin, belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan belanja operasi pemerintah daerah dengan pendapatan rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Disebabkan karena pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi.¹⁰²

¹⁰¹ Sakina Nusarifa Tantri Dan Putri Irmawati. "Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016". Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol.1. No.1. Hal. 27-37. Maret 2018.

¹⁰² Mahmudi. Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...*, hal.162-163

3. Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antar realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Hasil dari analisis Efisiensi belanja pada Kabupaten Blitar yaitu Pada tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 86.65%, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,7% menjadi 91,35%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 2.75% yaitu menjadi 94.10% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu mencapai 5.53% dan menjadi 88.57%. Secara keseluruhan jika dilihat rata-rata persentase rasio efisiensi belanja daerah dari tahun 2015-2018 pemerintah daerah Kabupaten Blitar sebesar 90.17% yang artinya kinerja pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran atau tidak terjadi pemborosan anggaran karena nilai efisiensi belanjanya kurang dari 100%.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lontaan dan Pangerapan, bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa telah efisien dalam menggunakan belanja sesuai dengan anggaran yang telah disusun berdasarkan APBD.¹⁰³ Hasil analisis ini didukung teori dari Mahmudi yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, begitu sebaliknya apabila lebih dari 100% maka telah diidentifikasi telah melakukan pemborosan anggaran.¹⁰⁴

¹⁰³ Indra Christian Lontaan dan Sonny Pangerapan. "Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014". Jurnal EMBA. Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 898-906

¹⁰⁴ Mahmudi. Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...*hal.164.

C. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Kabupaten Blitar di Tinjau dari perspektif Islam.

Akuntansi dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga akuntansi syariah akan mempengaruhi para pelaku ekonomi termasuk pelaku transaksi kepada perilaku yang lebih etis, karena akuntansi syariah didasarkan pada prinsip islam yang menerapkan sikap etis termasuk dalam perilaku ekonomi. Informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran, tindakan, bahkan sampai pada pengambilan keputusan dalam bisnis.¹⁰⁵

Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik.¹⁰⁶ Sehingga Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dlebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-182 yang berbunyi :

وَفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”

¹⁰⁵ Hani Werdi Apriyanti. *Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik*. Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol. 6 No. 2 Juli 2017. hal. 131 - 140

¹⁰⁶ Mahmudi. Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...*,hal.89

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ

*“dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.”*¹⁰⁷

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Dr. Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan dengan benar, maka perlu adanya fungsi auditing. Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut “tabayyun” sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:

فَتَصْنِجُوا بَجَهَالَةٍ قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَنَبِيئُوا بِنَبَاٍ فَاسِقٍ جَاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَآ يَا نَادِمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَى

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”*¹⁰⁸

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa’ ayat 35 yang berbunyi:

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Asy-Syu’ara ayat 181-184 ayat 35 dan Terjemahannya*, (Semarang : CV.Karya Toba Putra).

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Surah Al-Hujuraat ayat 6 dan Terjemahannya*, (Semarang : CV.Karya Toba Putra).

تَأْوِيلٌ وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كَلْتُمْ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰⁹

Dalam menilai Kinerja keuangan tercermin dari Laporan Realisasi anggaran, apabila pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam, sesuai dengan surat Al Baqarah 282 dijelaskan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan.¹¹⁰ Ayat tersebut berbunyi:

بَيْنَكُمْ وَلْيُكْتَبَ فَانْكُتِبْهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ نَدَّائِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
الَّذِي وَلِيْمَلِلْ فَلْيُكْتَبَ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتَبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ
الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ لِيَتَّقُوا الْحَقُّ عَلَيْهِ
وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيُكْتَبَ هُوَ يُكْتَبُ أَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا
مَنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ وَنَايِكٌ لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ
مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا تَضَلَّ أَنْ الشُّهَدَاءُ
اللَّهُ عِنْدَ أَفْسَطُ ذَلِكَ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتَبُوهُ أَنْ تَسَامُوا وَلَا دُعَا
بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْرَبُ
شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا تَكْتَبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا بِكُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surah Al-Israa' ayat 35 dan Terjemahannya*, (Semarang : CV.Karya Toba Putra).

¹¹⁰ Hani Werdi Apriyanti. *“Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik”*. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 2 Juli 2017. hal. 131 - 140

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹¹

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa dalam surat Al Baqarah 282 Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi selama melakukan kegiatan muamalah. Penerapan konsep pertanggungjawaban dalam kinerja keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam praktik bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak yang terkait. Perintah ini bersifat universal yang artinya dalam praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar.¹¹²

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an surat Al Baqarah 282 dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Karya Toba Putra). hal. 48.

¹¹² Iwan Triuwono. “*Akuntansi Syariah*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012. hal. 318

Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa Kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dilihat dari segi pencatatan dan pelaporan suatu Laporan Realisasi Anggaran sudah diterapkannya Nilai-nilai keislaman sesuai dengan surat al baqoroh ayat 282. Sehingga dalam kaidah Akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Sejalan dengan Penelitian Pravita sari, dalam penelitian mengenai kode etik akuntansi islam di Indonesia yaitu Kebenaran dan keadilan dalam menakar yang menyangkut dalam hal pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga mengharuskan seorang Akuntan untuk menakar kekayaan secara benar dan adil.¹¹³

¹¹³ Dyah Pravitasari. "Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam Di Indonesia." E-journal AN-NISBAH, Vol. 01, No. 02, April 2015.